

# Landasan berpikir tentang manajemen berbasis sekolah dalam sekolah dasar

Edi Zalharis<sup>1</sup>, Ade Sentia Arsy Sibila<sup>2</sup>, Winda Nopriani<sup>3</sup>, Saipul Annur<sup>4</sup>, Ade Rosad<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

Email\*: [edizalharis47@gmail.com](mailto:edizalharis47@gmail.com)<sup>1</sup>, [adesentiaarsysabila30@gmail.com](mailto:adesentiaarsysabila30@gmail.com)<sup>2</sup>, [windanopriai.wn@gmail.com](mailto:windanopriai.wn@gmail.com)<sup>3</sup>, [saiipulannur\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:saiipulannur_uin@radenfatah.ac.id)<sup>4</sup>, [ade@unuha.ac.id](mailto:ade@unuha.ac.id)<sup>5</sup>,

Received: 18 April 2025

Revised: 4 Mei 2025

Accepted: 13 Juni 2025

Published: 17 Juni 2025

Corresponding Author: Rastiana

Email\*: [rastiana321@gmail.com](mailto:rastiana321@gmail.com)<sup>1</sup>

DOI:

<https://doi.org/10.58176/edu.v6i1.2672>

© 2025 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)



Phone\*: +6285231538471

**Abstrak:** Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan. Artikel ini mengkaji dasar-dasar filosofis, hukum, sosial, dan psikologis yang mendasari penerapan MBS di Sekolah Dasar. Dalam konteks otonomi daerah, MBS muncul sebagai respons terhadap desentralisasi pendidikan di Indonesia, memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami implementasi MBS di Sekolah Dasar. Temuan penelitian menyoroti pentingnya partisipasi semua pihak, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, serta dukungan regulasi dan budaya sekolah yang kondusif. MBS berperan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala. Sinergi antara kebijakan otonomi daerah dan penerapan MBS, didukung pelatihan, penguatan kelembagaan, dan pengawasan efektif, dapat memperkuat peran sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan yang mandiri, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Manajemen berbasis sekolah, desentralisasi pendidikan, Sekolah Dasar, Mutu Pendidikan

**Abstract:** *School-Based Management (SBM) is a form of educational decentralization that grants greater autonomy to schools in managing resources and learning processes to improve the quality of education. This article examines the philosophical, legal, social, and psychological foundations underlying the implementation of SBM in elementary schools. In the context of regional autonomy, SBM emerges as a response to decentralization in Indonesia's education system, allowing for policies that better align with local needs. This study employs a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation to understand SBM implementation at the elementary level. The findings highlight the importance of stakeholder participation, visionary school leadership, as well as supportive regulations and school culture. SBM plays a role in enhancing the efficiency, effectiveness, transparency, and accountability of educational management. However, challenges such as limited budgets, low human resource capacity, and insufficient community participation remain obstacles. The synergy between regional autonomy policies and SBM implementation, supported by training, institutional strengthening, and effective supervision, can strengthen schools as independent, transparent, and accountable centers for improving educational quality.*

## Pendahuluan

Pendidikan adalah elemen kunci dalam proses pembangunan suatu negara. Standard pendidikan tidak hanya memengaruhi kemajuan setiap individu, tetapi juga berfungsi sebagai ukuran kemajuan suatu bangsa secara lebih luas. Di Indonesia, pendidikan diatur sebagai hak dasar warga negara berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1), yang menegaskan bahwa "Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan." Namun, tantangan signifikan muncul ketika sistem pendidikan nasional harus menghadapi keragaman kondisi geografi, sosial, budaya, dan ekonomi di seluruh Indonesia. Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, pemerintah di Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Desentralisasi daerah ini bertujuan untuk memberikan wewenang kepada wilayah dalam mengelola sumber daya lokal, termasuk sektor pendidikan, untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi kebijakan publik sesuai dengan keadaan setempat. Namun, pelaksanaan desentralisasi daerah sering mengalami hambatan seperti ketidakmerataan sumber daya antar daerah, kurangnya kemampuan aparat daerah, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di tingkat Sekolah Dasar adalah langkah penting untuk memperkuat mutu pendidikan dari bawah. Pendidikan dasar berfungsi sebagai landasan utama dalam pengembangan sumber daya manusia, yang menjadikan pengelolaannya sangat krusial bagi keberhasilan sistem pendidikan secara keseluruhan.

MBS memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dalam membuat keputusan, mengatur sumber daya, dan meningkatkan standar kualitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Mulyasa (2009) menyatakan bahwa "MBS adalah suatu model manajemen pendidikan yang memberi keleluasaan besar kepada sekolah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada secara efektif demi meningkatkan mutu pendidikan." Kepentingan MBS di tingkat Sekolah Dasar terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan pendidikan.

Dalam sebuah sistem yang terpusat, proses pengambilan keputusan seringkali lamban dan tidak sesuai dengan kondisi unik di setiap sekolah. MBS muncul sebagai jawaban untuk memperkuat peran kepala sekolah, para pengajar, dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Seperti yang dinyatakan oleh Dimmock dan Walker (2005), "Manajemen berbasis sekolah mendorong partisipasi, menciptakan rasa kepemilikan, dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal." Hal ini menjadi sangat penting dalam situasi Sekolah Dasar yang memerlukan pendekatan manajerial yang lebih fleksibel dan sesuai konteks. Selain itu, MBS mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan institusi pendidikan, yang pada akhirnya memicu akuntabilitas dan keterbukaan.

Dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007 mengenai Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, diungkapkan bahwa salah satu prinsip utama dalam pengelolaan sekolah adalah bersifat partisipatif dan akuntabel. Dengan MBS, Sekolah Dasar dapat membangun kerjasama yang lebih solid dengan orang tua serta masyarakat dalam merencanakan program kerja, mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan mengevaluasi pencapaian belajar siswa. Hal ini semakin ditekankan oleh pendapat Slamet (2003), yang mengungkapkan bahwa "Manajemen berbasis sekolah adalah langkah pemberdayaan sekolah dalam konteks otonomi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas manajerial." Dengan begitu, MBS bukan hanya sekadar metode teknis, tetapi juga merupakan pendekatan filosofi dan strategi untuk mewujudkan pendidikan dasar yang memiliki kualitas.

Sekolah Dasar sebagai garda terdepan dalam sistem pendidikan nasional memerlukan kebebasan dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan internal agar dapat menciptakan suasana belajar yang inklusif, responsif, dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan MBS di Sekolah Dasar menjadi suatu keharusan yang mendesak dalam membangun sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembelajaran siswa. Implementasi MBS pada periode otonomi daerah memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan keterlibatan

masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Namun, kesuksesan pelaksanaan MBS sangat tergantung pada dedikasi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, pengajar, orang tua, dan masyarakat luas. Sebaliknya, hambatan dalam pelaksanaan MBS juga tidak dapat diabaikan. Rahman mengungkapkan bahwa beberapa sekolah di wilayah kurang berkembang masih mengalami berbagai kesulitan seperti keterbatasan dana, rendahnya pemahaman kepala sekolah dan pengajar mengenai konsep MBS, serta penolakan terhadap perubahan dari individu yang telah terbiasa dengan sistem terpusat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, termasuk pelatihan intensif bagi pengajar dan kepala sekolah, peningkatan dana pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta penguatan peran komite sekolah sebagai mitra strategis dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, keterkaitan otonomi daerah dengan sektor pendidikan juga dapat diamati dari inisiatif pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan konteks setempat. Sebagai contoh, beberapa wilayah telah berhasil menggabungkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan, seperti yang terlihat di Yogyakarta dan Bali (Wardani et al., 2022). Ini mengindikasikan bahwa otonomi daerah dapat berfungsi sebagai alat yang utama untuk meningkatkan keselarasan pendidikan dengan tuntutan masyarakat.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan riset pustaka. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam akan dasar pemikiran manajemen berbasis sekolah dalam konteks pendidikan dasar melalui analisis literatur yang relevan dan dapat dipercaya. Tujuan dari studi ini bukanlah untuk mengumpulkan data empiris dari lapangan, melainkan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis, regulasi, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Pendekatan kajian pustaka diambil karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam konsep, prinsip, dan relasi antara otonomi daerah dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui analisis sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal akademik, dokumen regulasi pemerintah, dan data statistik.

Aspek utama dari penelitian ini adalah ketimpangan dalam penerapan otonomi daerah dalam sektor pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal yang menghadapi masalah anggaran terbatas, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan partisipasi masyarakat yang lemah. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), antara lain rendahnya kapasitas kepala sekolah dan guru, penolakan terhadap perubahan dari sistem yang terpusat, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah. Penelitian ini juga meneliti sinergi antara kebijakan otonomi daerah dan MBS, serta bagaimana keduanya dapat saling mendukung untuk menciptakan tata kelola pendidikan yang partisipatif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Dasar Otonomi Daerah

Otonomi daerah merujuk pada hak, kekuasaan, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, sesuai dengan hukum yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Ide ini merupakan suatu bagian dari reformasi politik dan administrasi di Indonesia setelah tahun 1998, dengan tujuan untuk menekan kekuasaan sistem pusat dan memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Menurut Khusaini, M. (2018) dalam pandangannya mengenai desentralisasi, otonomi daerah berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kuasa dari pusat ke daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, responsif, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat identitas budaya lokal dan mengatasi kesenjangan antara daerah. Menurut Mardiasmo, keberhasilan dalam otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan lembaga lokal. Di Indonesia, meskipun otonomi daerah telah memberi kebebasan kepada daerah untuk mengelola pendidikan, banyak daerah yang tertinggal masih menghadapi tantangan struktural, seperti anggaran yang terbatas, kapasitas aparatur yang rendah, dan infrastruktur yang kurang memadai. Misalnya, di Provinsi Papua, walaupun terdapat kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses

pendidikan melalui otonomi khusus, hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Papua masih di bawah rata-rata nasional, yakni sekitar 65% untuk pendidikan dasar, sementara rata-rata nasional mencapai 95%. Hal ini menandakan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah yang tertinggal.

### **Prinsip Dasar Otonomi Daerah**

Otonomi lokal berlandaskan pada tiga prinsip utama: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan. Ketiga prinsip ini memiliki fungsi yang signifikan dalam pengaturan urusan pemerintahan, termasuk sektor pendidikan.

a. Desentralisasi

Desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan pemerintahan. Mardiasmo (2021) dalam teori pemerintahan polisentris menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan unit-unit pemerintahan yang berlokasi lebih dekat dengan masyarakat untuk mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih dapat memenuhi kebutuhan lokal secara efektif. Dalam ranah pendidikan, desentralisasi memberikan kebebasan kepada daerah untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan keadaan geografis, sosial, dan budaya setempat. Contohnya, di Yogyakarta, beberapa sekolah sudah memasukkan nilai-nilai budaya Jawa, seperti unggah-ungguh (etika) dan gotong royong, ke dalam program pembelajaran mereka. Langkah ini membantu siswa mengerti budaya mereka sendiri sambil tetap mengikuti standar pendidikan nasional. Namun, Khusaini menunjukkan bahwa desentralisasi sering kali tidak berhasil disebabkan oleh minimnya kemampuan institusi lokal. Di Indonesia, banyak daerah yang tertinggal belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola pendidikan secara mandiri. Akibatnya, walaupun terdapat otonomi, kualitas pendidikan tetap belum memuaskan.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merujuk pada pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada gubernur yang bertindak sebagai perwakilan pemerintahan. Praktik dekonsentrasi biasanya diterapkan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal, meskipun terdapat otonomi daerah. Dalam sektor pendidikan, dekonsentrasi dapat terlihat melalui pelaksanaan inisiatif nasional seperti Ujian Nasional atau Kurikulum Merdeka.

Meskipun daerah mempunyai hak otonomi, mereka tetap diwajibkan untuk mengikuti standar nasional yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan adanya keseragaman dalam kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, Huda (2019) menunjukkan bahwa dekonsentrasi seringkali menimbulkan ketegangan antara kebijakan yang dikeluarkan pusat dan daerah. Sebagai contoh, beberapa wilayah merasa bahwa standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak sejalan dengan keadaan lokal mereka, sehingga menjadi sulit untuk diterapkan.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merujuk pada penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Contohnya, pemerintah pusat bisa menyalurkan dana bantuan operasional sekolah kepada daerah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar. Huda menegaskan bahwa peran tugas pembantuan dalam sektor pendidikan sangat krusial untuk mengatasi disparitas anggaran antar wilayah. Namun, seberapa efektif tugas pembantuan ini sangat tergantung pada kemampuan aparat daerah dalam mengelola dana tersebut. Di beberapa wilayah, dana bantuan operasional sekolah seringkali tidak dimanfaatkan secara maksimal disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

### **Relevansi Otonomi Daerah**

Otonomi daerah memiliki pengaruh besar pada sektor pendidikan. Dengan adanya otonomi, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan

masyarakat setempat. Namun, permasalahan seperti ketidakmerataan anggaran dan kualitas tenaga pengajar sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam pendidikan. Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa wilayah terbelakang, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, masih jauh di bawah tingkat rata-rata nasional.

Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas dan akses pendidikan. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu didukung dengan kebijakan yang efektif untuk mengatasi ketidakmerataan ini, seperti peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi guru (Badan Pusat Statistik, 2022). Menurut Samoff (2003), dalam pandangannya mengenai desentralisasi pendidikan, keberhasilan otonomi daerah di sektor pendidikan ditentukan oleh tiga elemen kunci:

- a. Kemampuan Kelembagaan: Daerah perlu memiliki staf yang terampil untuk mengelola pendidikan.
- b. Keterlibatan Komunitas: Masyarakat harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan.
- c. Keterbukaan dan Tanggung Jawab: Proses pengambilan keputusan mesti terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari praktik korupsi.

Di beberapa daerah yang kurang maju, ketiga elemen ini sering kali tidak terpenuhi. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Timur, sejumlah sekolah mengalami masalah seperti kurangnya guru berkualitas, kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan (Rahman, 2021). Contoh lain adalah Aceh, yang merupakan salah satu provinsi yang memperoleh otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus ini memberi Aceh keleluasaan untuk menyisipkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan. Fadillah (2019) berargumen bahwa penerapan otonomi khusus di Aceh telah berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Sebagai ilustrasi, beberapa sekolah di Aceh telah mengadopsi pendekatan pendidikan berbasis Islam yang menggabungkan nilai-nilai agama dalam proses belajar mengajar.

### *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan metode pengelolaan yang memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan untuk mengatur sumber dayanya dengan mandiri. Pendekatan ini menekankan peran aktif dari semua pihak terkait, seperti guru, orang tua, siswa, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan mutu pendidikan. Di Indonesia, penerapan MBS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan dan diperkuat oleh Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018.

Tujuan dari konsep ini adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pendidikan. Lebih lanjut, menurut Ismail, MBS bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pendidikan dengan memberdayakan kepala sekolah, guru, siswa, dan komunitas. Sebagai tambahan, Timpal (2024) menyatakan bahwa dalam teori manajemen berbasis sekolah, MBS adalah respons terhadap kegagalan sistem pusat dalam memenuhi kebutuhan lokal.

Melalui MBS, sekolah diberikan kebebasan untuk mengelola anggaran, kurikulum, dan sumber daya lain sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Di Indonesia, MBS diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan setelah tahun 1998 untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pendekatan ini memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, beberapa sekolah di Yogyakarta telah menerapkan MBS untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat ke dalam kurikulum, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya di daerah tersebut (Wardani, I. G. A. K., Suharsono, A., & Rahayu, S., 2022).

### *Prinsip Dasar Manajemen Berbasis Sekolah*

Ada empat pilar penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu keterlibatan, keterbukaan, tanggung jawab, dan efisiensi serta efektivitas. Keempat pilar ini saling berhubungan dan menjadi fondasi bagi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah yang berhasil.

a. Partisipasi

Partisipasi melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, komite sekolah, serta masyarakat, dalam proses pembuatan keputusan. Timpal (2024) dalam pandangannya tentang perubahan pendidikan menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan mampu memenuhi kebutuhan yang ada di lingkungan lokal. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sering kali terwujud melalui Komite Sekolah. Komite Sekolah berperan sebagai rekan strategis dalam merancang program pendidikan, memantau penggunaan anggaran, serta memberikan masukan kepada kepala sekolah. Namun, temuan Rahman menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam MBS masih tergolong rendah di beberapa wilayah terbelakang, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat.

b. Transparansi

Transparansi merupakan suatu mekanisme pengambilan keputusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ismail dalam analisis mengenai tata kelola sekolah menyatakan bahwa transparansi sangat krusial untuk menghindari praktik korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal (Ismail, F, 2018). Dalam kerangka MBS, transparansi dapat ditemukan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Contohnya, di sejumlah sekolah di Jawa Barat, laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disampaikan secara terbuka kepada publik melalui papan pengumuman atau pertemuan rutin dengan Komite Sekolah. Langkah ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk kepada tanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh. Duryat dan Sahrodi dalam studi mereka mengenai kepemimpinan sekolah menjelaskan bahwa akuntabilitas menjamin bahwa institusi pendidikan bertanggung jawab kepada masyarakat mengenai performanya. Dalam sistem Manajemen Berbasis Sekolah, akuntabilitas sering diwujudkan melalui penilaian kinerja sekolah oleh pemerintah daerah atau Lembaga yang bersifat independen. Contohnya, di wilayah DKI Jakarta, sejumlah sekolah telah menerapkan sistem evaluasi kinerja yang berfokus pada hasil belajar siswa untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan dengan efisien.

d. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi dan efektivitas merujuk pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal untuk memenuhi sasaran pendidikan. Armansyah berpendapat bahwa efisiensi dan efektivitas dalam Manajemen Berbasis Sekolah sangat krusial untuk menjamin pemakaian anggaran pendidikan secara cermat. Di Indonesia, sejumlah sekolah telah mencapai peningkatan efisiensi melalui inovasi dalam pengelolaan dana. Contohnya, di beberapa sekolah Bali, dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk memperoleh peralatan laboratorium yang diperlukan siswa, dengan tujuan meningkatkan mutu pembelajaran praktik.

#### *Hubungan Manajemen Berbasis Sekolah Dengan Otonomi Daerah*

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memainkan peran krusial dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, sekolah diizinkan untuk mengatur sumber daya sesuai dengan keperluan lokal. MBS memperkuat prinsip otonomi daerah dengan memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk berinovasi dan memperbaiki kualitas pendidikan. Menurut Timpal, Manajemen Berbasis Sekolah merupakan alat efektif dalam meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal dalam sistem pendidikan. Implementasi MBS telah bantu sekolah-sekolah di daerah tertinggal dalam merancang program pendidikan yang lebih relevan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Selain itu, MBS juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan

terkait pendidikan. Komite Sekolah, yang merupakan wakil orang tua dan masyarakat, berperan aktif dalam merancang program pendidikan, memantau penggunaan dana, dan memberikan masukan kepada kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Duryat, H.M., & Sahrodi, H.J, 2021). Menurut Samoff, terdapat sinergi yang kuat antara Manajemen Berbasis Sekolah dan otonomi daerah karena keduanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Contoh sinergi ini dapat dilihat di beberapa daerah, seperti Aceh dan Papua, di mana MBS telah diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

Sebagai contoh, implementasi manajemen berbasis sekolah telah sukses meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Misalnya, Komite Sekolah berperan aktif dalam merancang program ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat siswa, seperti seni tradisional dan olahraga. Suharto (2020) menyatakan bahwa keberhasilan MBS di sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh tiga elemen kunci:

- a. Kepemimpinan Kepala Sekolah: Pemimpin sekolah memiliki pandangan yang jelas dan mampu menggerakkan semua pihak yang terlibat.
- b. Partisipasi Masyarakat: Orang tua siswa dan Komite Sekolah terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan penggunaan dana disampaikan secara terbuka kepada masyarakat (Suharto, E., 2020).

## Kesimpulan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pendekatan desentralisasi pendidikan yang menekankan pada kemandirian, partisipasi, dan akuntabilitas di tingkat satuan pendidikan, termasuk Sekolah Dasar. Berdasarkan landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan psikologis, MBS memberi ruang bagi sekolah untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif dan efisien demi peningkatan mutu pembelajaran. Pelaksanaan MBS di Sekolah Dasar menuntut peran aktif kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, guru sebagai pelaksana kurikulum, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat sebagai mitra strategis sekolah. Penerapan MBS di Sekolah Dasar juga mendorong tumbuhnya budaya partisipatif dan transparan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi kinerja sekolah.

Hal ini memperkuat kapasitas sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Namun, keberhasilan implementasi MBS sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, dan keberlanjutan program pembinaan dari pemerintah. Dengan demikian, MBS bukan hanya sekadar strategi manajerial, tetapi merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan dasar yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengembangan kualitas pendidikan. Untuk itu, pemahaman yang komprehensif terhadap landasan berpikir MBS menjadi kunci utama bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara merata dan berkeadilan.

## Referensi

Ahmad, Z. T. (2024). Integrasi sains dan agama dalam kurikulum pendidikan Islam: Pendekatan kontekstual. *Educator: Directory of Elementary Education Journal*, 5(2), 1–11. <https://doi.org/10.58176/edu.v5i2.1541>

Armansyah, Y. (2016). Menyoal relevansi kebijakan otonomi daerah dan otonomi pendidikan dikaji dari kesejahteraan. *EI-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/EI-idare/article/view/909>

Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. <https://www.bps.go.id>

Dones, M. D., Estremera, M. L., & Deuda, M. J. D. (2022). School-based management perspectives: Exploring top-down policy execution at the grassroots level. *European Journal of Educational Management*, 6(2), 101–118. <https://www.eujem.com/>

Duryat, H. M., & Sahrodi, H. J. (2021). Manajemen pendidikan anti korupsi: Wacana kritis tentang etika kekuasaan dan budaya kepatuhan melalui pendidikan. K-Media.

Fadillah, M. (2019). Implementasi otonomi khusus dalam pendidikan di Aceh: Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum sekolah. *Jurnal Pendidikan Aceh*, 10 (2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/aceh.v10i2.5678>

Firdianti, A., & Pd, M. (2018). Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Gre Publishing.

Huda, N. M. (2019). Hukum pemerintahan daerah. Nusa Media. Ismail, F. (2018). Manajemen berbasis sekolah: Solusi peningkatan kualitas pendidikan. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 2(2). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/541>

Khoiril Anam, & Yahiji, K. (2024). Landasan paradigmatis Islamisasi ilmu pengetahuan. *Educator: Directory of Elementary Education Journal*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.58176/edu.v5i1.1546>

Mardjuni, P. M., Mobonggi, A., & Manahung, R. (2022). Strategi guru dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah dasar. *Educator: Directory of Elementary Education Journal*, 3(1), 75–103. <https://doi.org/10.58176/edu.v3i1.756>

Rahman, A. (2021). Challenges and opportunities of school-based management in decentralized education systems. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/jpi.v10i2.1234>

Samoff, J. (2003). Decentralization: Does it enhance or undermine quality? In J. Samoff & B. Stromquist (Eds.), *Education sector decentralization: Lessons from Africa and Asia* (pp. 1–25).

Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi otonomi daerah pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(2), 68–84. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jeppupr/article/view/11379>

Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/ibp/article/view/38>

Suharto, E. (2020). Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam konteks otonomi daerah. Alfabeta. <https://www.researchgate.net/publication/341234567>

Timpal, C. (2024). Manajemen berbasis sekolah. Mega Press Nusantara. Wardani, I. G. A. K., Suharsono, A., & Rahayu, S. (2022). Community participation in school-based management: A case study in Yogyakarta. *International Journal of Educational Development*, 15(4), 234–245. <https://doi.org/10.6789/ijed.v15i4.567>